

MEMBANGUN MASYARAKAT BELAJAR BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI

Gustina

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Batusangkar, Sumatera Barat, Indonesia
gustinaiaibnsk@yahoo.com

ABSTRAK

Fokus kajian dalam artikel ini adalah membangun masyarakat belajar berbasis kearifan lokal dalam rangka mewujudkan masyarakat madani. Untuk mendalami fokus tersebut beberapa kajian yang diuraikan adalah: pertama, pengertian dan ciri-ciri masyarakat belajar, kedua, pengertian, dimensi, bentuk, dan manfaat kearifan lokal, ketiga, membangun masyarakat belajar untuk mewujudkan masyarakat madani berbasis kearifan lokal, dan keempat, masyarakat madani dan kesejahteraan sosial. Tujuan dan manfaat yang dapat diperoleh dari uraian artikel ini adalah: pertama, menumbuhkembangkan budaya belajar dikalangan masyarakat, baik di lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat secara luas. Kedua, internalisasi nilai-nilai kearifan lokal budaya daerah dalam kehidupan sehari-hari sebagai salah satu identitas budaya bangsa Indonesia, Ketiga, meningkatkan kesadaran bahwa pendidikan berbasis kearifan lokal dapat dikatakan sebagai model pendidikan yang memiliki relevansi tinggi bagi pengembangan kecakapan hidup (life skills) dengan bertumpu pada pemberdayaan keterampilan dan potensi lokal di masing-masing daerah terutama daerah Sumatera Barat yang berakar dari budaya Minangkabau.

Kata Kunci: masyarakat, belajar, kearifan lokal, madani, budaya Minangkabau.

A. Pendahuluan

Disadari atau tidak, bahwasekolah bukan satu-satunya wadah yang dapat diandalkan untuk membangun masyarakat belajar. Lahirnya organisasi-organisasi baru berpenampilan pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan tanpa label sebagai tambahan, perluasan lanjutan dan lainnya memberikan kesempatan dan kemudahan kepada masyarakat untuk belajar dan membelajarkan dirinya. Menurut Ensiklopedi Pendidikan yang ditulis Munandir perkembangan dan perubahan masyarakat yang begitu cepat dan penuh dengan tuntutan dan tantangan, yang cenderung makin keras, harus dihadapi. Sistem pendidikan, selama ini dinilai lamban penyesuaiannya terhadap tuntutan kemajuan dan perubahan. Sistem Pendidikan dinilai tidak responsif terhadap perubahan, bersifat kaku, sering otoriter dan ini kelihatan nyata di dalam kurikulumnya.

Selain itu, terdapat masalah lain yang diakibatkan oleh dominasi pendidikan sekolah yaitu kecenderungan menyimpang bagi berkembangnya penyakit ijazah. Masyarakat menjadi tidak kreatif dan bergantung pada ijazah sekolah untuk dapat sukses dalam kehidupan, atau mendapat pekerjaan. Strategi pendidikan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah membangun masyarakat belajar sepanjang hidup” (*lifelong learning society*).

Pengembangan masyarakat belajar sepanjang hidup menuntut penghargaan dan layanan pendidikan bagi semua orang (*education for all*) kapan dan dimana saja, tidak hanya terbatas pada sistem pendidikan formal dalam lembaga pendidikan di sekolah, madrasah atau bahkan di perguruan tinggi. ‘Pembentukan masyarakat belajar di samping sangat penting sebagai instrumen dasar bagi pencapaian kemajuan ekonomi dan politik, juga penting bagi pengembangan masyarakat yang bijak dan manusiawi’ (Kuntoro, 1997: 45).

B. Pengertian dan Ciri-ciri Masyarakat Belajar

Kata masyarakat dapat disamakan dengan *community* dan *society*, yang secara teknis ilmiah artinya berbeda-beda menurut para ahli sosiologi. Pada tulisan ini kata masyarakat didefinisikan dengan suatu kehidupan bersama di suatu wilayah dan waktu tertentu dengan pola-pola kehidupan yang terbentuk oleh antar hubungan dan interaksi warga masyarakat itu dengan alam sekitar (Syam, 1986: 184).

Masyarakat belajar mengandung makna adanya komitmen nilai-nilai belajar dan sistem pendidikan yang menjamin semua orang memperoleh kesempatan untuk belajar agar dapat mengembangkan kapasitas dirinya secara optimal (Kuntoro, 1997: 47). Menurut Husen (1995: 102-103) makna masyarakat belajar itu adalah, makin lama makin banyak orang yang harus mendidik diri sendiri untuk waktu yang semakin panjang yang tidak hanya sesuai untuk kepentingan dirinya sendiri dan keadilan demokrasi, tetapi juga cocok dengan kebutuhan masyarakat selama sector wiraswasta sangat membutuhkan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi dan ketika individu menganggap konsumsi pendidikan sebagai bagian standar hidup yang memadai. Sementara Harefa mengatakan setiap orang yang bertanggung jawab akan melakukan dua hal: *Pertama*, mengenali hakekat diri, potensi dan bakat-bakat terbaiknya, dengan

selalu mencari jawaban yang terbaik. *Kedua*, berupaya untuk mengaktualisasikan potensi dirinya.

Dunia industri akan terus majutidak terbandung menjadi industri super canggih, berteknologi tinggi, di tengah-tengah sistem ekonomi dunia yang teritegrasi. Tidak ada tempat bagi tenaga kerja tanpa keterampilan dan keahlian. Jawaban untuk keadaan demikian adalah masyarakat belajar (*learning society*). Didalam masyarakat seperti itu orang dituntut untuk belajar terus-menerus sepanjang hayat. Di antara ciri-ciri masyarakat belajar yaitu;

1. Terbukanya kesempatan setiap orang, organisasi, dan institusi sosial, industri, dan masyarakat untuk belajar lebih luas.
2. Tumbuhnya semangat dan motivasi untuk belajar mandiri.
3. Adanya upaya memperkuat keberdaya-didikan (*educability*) masyarakat agar selalu mendidik diri dan masyarakat di lingkungannya (Kamil, tt).

Masyarakat belajar mempersyaratkan adanya sikap yang mendukung, yaitu sikap mau dan suka belajar, belajar terus-menerus, belajar seumur hidup. Tugas pendidikan adalah mendorong terbentuknya sikap dan nilai yang demikian itu sehingga belajar terus-menerus sepanjang hayat itu suatu kebutuhan. Tujuan pendidikan atau belajar sepanjang hidup bukan sekedar pengembangan SDM untuk pencapaian keberhasilan ekonomis. tetapi tujuannya lebih humanistik yaitu peningkatan kualitas diri dan kehidupan lingkungan. perkembangan diri yang komplit, original, dan mandiri. Tujuan pendidikan bukan mengarah pada “*having*” tetapi lebih kearah *being*. Lebih lanjut, Trianto, (2010: 116-117) menegaskan bahwa ‘dalam masyarakat belajar, dua kelompok atau lebih yang terlibat dalam komunikasi pembelajaran saling belajar satu sama lain. Seseorang yang terlibat dalam kegiatan masyarakat belajar memberi informasi yang diperlukan oleh teman bicaranya dan sekaligus juga meminta informasi yang diperlukan dari teman belajarnya’.

C. Kearifan Lokal

Kearifan lokal dapat dimaknai sebagai kearifan yang muncul dari corak kehidupan tradisional yang didasari oleh budaya yang lahir dan berkembang dari masyarakat itu sendiri yang dilandasi oleh kepercayaan-kepercayaan, adat istiadat, nilai-nilai

tradisional. Sistem nilai-nilai tradisional dan budaya merupakan pedoman yang dianut oleh setiap anggotamasyarakat terutama dalam bersikap dan berperilaku dan juga menjadi patokan untuk menilai dan mencermati bagaimana individu dan kelompok bertindak dan berperilaku. Sistem nilai dapat dikatakan sebagai norma standar dalam kehidupan bermasyarakat.

Djajasudarma dkk(2002:13) mengemukakan bahwa sistem nilai begitu kuat meresap dan berakar di dalam jiwa masyarakat sehingga sulit diganti atau diubah dalam waktu singkat. Nilai-nilai yang diyakini dan terinternalisasi dalam diri individu sehinggaterhayati dalam setiap perilaku disebut juga sebagai kearifan lokal. Secara substansial, kearifan lokal adalah nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah-laku masyarakat setempat. Dengan demikian, perlu digagas dan dirumuskan strategi membangun masyarakat belajar berbasis kearifan lokal bagi masyarakat Indonesia yang multi budaya ini. Kearifan lokal merupakan pengetahuan lokal yang tercipta dari hasil adaptasi anggota masyarakat yang berasal dari pengalaman hidup mereka dan dikomunikasikan dari generasi ke generasi. Proses regenerasi kearifan lokal dilakukan melalui tradisi lisan/ kaba (cerita rakyat) dan tambo.

1. Pengertian Kearifan Lokal

Kearifan lokal diungkapkan dalam beragam istilah, tetapi pada dasarnya memiliki pengertian yang sama secara substansial. Istilah lain dari kearifan lokal diuraikan oleh Tinnaluck Y, dalam Basyir, K, dkk, (2013: 253-254) yaitu 'kejeniusan lokal (*local genius*), identitas lokal (*local identity*), pengetahuan asli (*indigenous knowledge*), pengetahuan rakyat (*folk knowledge*), pengetahuan ekologis (*ecological knowledge*), pengetahuan masyarakat (*community knowledge*), pengetahuan lokal (*local knowledge*), dan identitas budaya (*cultural identity*), bahkan disamakan dengan pandangan dunia (*world view*)'.

Kearifan lokal terdiri atas dua suku kata yaitu kearifan dan lokal. Kata kearifan identik dengan kebijaksanaan (*wisdom*). Kata lokal atau *locus* berarti tempat, tanah, daerah, atau wilayah geografis, misalnya ranah Minang, Mandailing, Sunda, Jawa dan sebagainya. Kearifan adalah 'kemampuan mengambil sikap dan sindakan secara positif, baik, dan bermanfaat, dengan menghindari dampak negatif, keburukan, dan kerugian. Kebijakan dapat berupa ungkapan-ungkapan atau frasa yang mencerminkan

keyakinan, pola pikir, prinsip, maupun dalam bentuk cara, sikap, perilaku, dan produk-produk tertentu, sebagaimana layaknya sebuah kebudayaan' (Basyir, K, dkk, 2013: 254).

Secara umum, *local wisdom* (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Menurut Nurjaya (2006: 2-4) kearifan lokal pada hakikatnya berpangkal dari sistem nilai dan religi yang dianut dalam komunitasnya. Di samping itu, kearifan lokal dapat diartikan sebagai;

Prinsip hidup, keyakinan, pola pikir, cara pandang, pengetahuan, sikap, perilaku atau produk yang dimiliki atau dihasilkan oleh suatu komunitas dalam mendayagunakan akal budinya sebagai ekspresi kebudayaan. Hal-hal itulah yang menjadi modal suatu masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup, mengatasi berbagai persoalan, berinteraksi dengan alam, dan lingkungan (Basyir, K., dkk, 2013: 258).

2. Dimensi Kearifan Lokal

Dimensi kearifan lokal dapat dipetakan dalam beberapa konteks berikut: (1) kekhasan tradisi dan budaya, (2) kemampuan beradaptasi dengan budaya lain, dan (3) modalitas dalam membangun keunggulan lokal (Basyir, K., 2013: 258).

Pertama, kekhasan tradisi dan budaya merupakan basis kearifan lokal. Integrasi dan interkoneksi nilai-nilai, pola pikir, sikap dan perilaku yang khas dari suatu daerah merupakan penciri kearifan lokal di daerah tersebut. Sebagai contoh, integrasi dan interkoneksi budaya Minangkabau dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat, misalnya dalam kehidupan sosial dan pembelajaran merupakan penciri pembelajaran dan kehidupan sosial dalam perspektif kearifan lokal budaya Minangkabau.

Kedua, kemampuan beradaptasi dengan budaya lain. Kearifan lokal sangat memungkinkan terjadinya asimilasi dan adaptasi budaya baru dalam suatu masyarakat secara bijaksana. Sentuhan budaya baru dalam kearifan lokal merupakan suatu kemestian dalam rangka munculnya inovasi dan transformasi budaya untuk pengembangan masyarakat. Jika tidak demikian halnya, bias jadi masyarakat tersebut akan jauh ketinggalan karena tidak siap dengan perubahan.

Ketiga, modalitas dalam membangun keunggulan lokal. Kearifan lokal dengan kekhasan budaya dan sumber daya yang dimiliki setiap daerah dapat dieksplorasi untuk menunjukkan keunggulan lokal. Keunggulan lokal yang khas sehingga dapat dibedakan

dengan daerah lainnya merupakan daya tarik dan memiliki nilai social dan ekonomi yang signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

3. Bentuk-bentuk Kearifan Lokal

Di lihat dari pemanfaatan kearifan lokal secara umum dapat dipilah menjadi dua yaitu ‘yang berlangsung secara natural, dan yang dikembangkan sebagai proses kreatif. Dialektika kebudayaan yang terjadi dalam sejarah merupakan bentuk manfaat kearifan lokal secara natural. Sedangkan pemanfaatan secara kreatif adalah kegiatan-kegiatan yang secara sadar dibangun dengan memanfaatkan kearifan lokal’ (Basyir, K., dkk, 2013: 259).

4. Manfaat Kearifan Lokal

Basyir, K., dkk, (2013: 262-264) menguraikan bahwa di antara manfaat kearifan lokal berkaitan dengan beberapa kepentingan berikut: (1) otonomi daerah, (2) pemberdayaan sosial, (3) meredakan konflik, (4) merespon perubahan, (5) membangun keunggulan lokal, (6) konservasi alam dan lingkungan.

Pertama, otonomi daerah merupakan perwujudan dari kebutuhan masyarakat terhadap desentralisasi dalam membangun kearifan lokal sebagai upaya mengatasi berbagai persoalan di negara berkembang. Pendekatan dari bawah ke atas (*bottom up*) memberikan kesempatan kepada setiap daerah untuk menunjukkan identitasnya yang membedakan dengan daerah lain, baik nilai-nilai luhur yang diyakini, kebiasaan positif yang menjadi jati diri daerah, cara pandang, pengetahuan, sikap, perilaku atau produk yang dihasilkan oleh daerah tersebut.

Otonomi daerah adalah sebuah kebijakan yang memberikan peluang untuk berkembangnya kearifan lokal. Demikian juga dapat diyakini bahwa kearifan lokal merupakan dasar untuk menentukan kebijakan di berbagai bidang di tingkat lokal. Basyir, K., dkk, (2013: 262) menyatakan bahwa di antara bidang-bidang kebijakan yang dapat dikelola meliputi bidang kesehatan, pertanian, pendidikan, pengelolaan sumber daya alam, dan kegiatan masyarakat pedesaan. Dalam kearifan lokal, terkandung pula kearifan budaya lokal. Kearifan budaya lokal adalah pengetahuan lokal yang sudah menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama.

Kedua, pemberdayaan sosial merupakan buah dari kearifan lokal, karena melalui kearifan lokal masyarakat dapat diajak untuk membangun kesadaran dirinya (*self awareness*) untuk mengeksplorasi potensi-potensi diri dan lingkungannya. Dengan kearifan lokal masyarakat dapat diajak untuk belajar memahami persoalan di sekitarnya yang selama ini luput dari perhatian mereka. Melalui kearifan local masyarakat didorong untuk berubah dan melakukan perubahan di berbagai bidang yang berpijak pada prinsip hidup, nilai-nilai, norma, sikap, pengetahuan, keahlian, dan sumber daya yang mereka miliki.

Ketiga, meredakan konflik adalah salah satu manfaat dari kearifan lokal. Kearifan lokal sering dijadikan sebagai pendekatan dalam menyelesaikan konflik. Konflik tidak hanya dapat diredakan melalui pendekatan hukum dan tindakan-tindakan rasional saja, melainkan juga dengan mengangkat kembali nilai-nilai lokal.

Keempat, merespon perubahan merupakan apresiasi masyarakat terhadap budaya-budaya baru yang berkembang, tanpa meninggalkan identitasnya. Karena nilai-nilai kearifan lokal adalah jatidiri suatu masyarakat yang tidak mudah luntur oleh budaya baru yang berkembang. Budaya-budaya baru yang berkembang bahkan perlu diolah dan dipadukan untuk memajukan budaya lokal dengan tetap menunjukkan jatidirinya yang khas.

Kelima, membangun keunggulan lokal merupakan spirit dan energy untuk menunjukkan kekhasan atau keunikan suatu daerah dengan daerah lain. Kekhasan dan keunikan tersebut menjadi daya tarik bagi masyarakat lainnya. Keunggulan local tersebut dapat berupa kebudayaan, sumber daya alam, suasana alam dan objek wisata, dan produk-produk yang dikembangkan di daerah tersebut yang berbeda atau khas dan unik dibanding dengan daerah lainnya.

Keenam, konservasi alam dan lingkungan merupakan salah satu tujuan kearifan lokal. Di sisi lain, kearifan lokal sekaligus menjadi salah satu asas yang harus diperhatikan dalam perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara lestari.

D. Membangun Masyarakat Belajar untuk Mewujudkan Masyarakat Madani Berbasis Kearifan Lokal

Konsep *civil society* telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan masyarakat sipil, masyarakat berdaya, masyarakat beradab, masyarakat maju, masyarakat modern dan masyarakat madani (Manan, 1998). Dalam masyarakat madani kebebasan individu sangat dihargai, anarkis sangat ditantang, kebebasan menyatakan pendapat dijunjung tinggi namun harus disertai dengan tanggung jawab etik.

Perubahan penting dalam pengembangan masyarakat belajar sepanjang hidup adalah konsep tentang guru. Pengertian guru tidak hanya dibatasi dalam pengertian konvensional “guru sekolah”, tetapi pengertian guru atau pendidik menjangkau semua anggota masyarakat dapat berperan sebagai guru. Secara ekstrim dapat dikatakan bahwa setiap kita dapat berperan sebagai guru atau sebagai siswa. Pengertian guru tidak dibatasi dalam batas sempit yaitu mereka yang memegang profesi guru di sekolah. Seorang pengrajin dia berperan sebagai guru manakala dia menyampaikan pengetahuan dan ketrampilannya pada orang lain yang membutuhkannya. Sebaliknya dia juga berperan sebagai siswa apabila dia menerima pengetahuan dan ketrampilan baru dari orang lain.

Menurut Sukidi (1998) *civil society* yang oleh Madjid diterjemahkan sebagai masyarakat madani prinsip-prinsip dasarnya telah dirintis oleh Nabi Muhammad Saw yang tertuang dalam piagam madinah. Dalam piagam ini telah ditemukan prinsip-prinsip dasar kebebasan beragama, persaudaraan antar agama, perdamaian dan kedamaian, persatuan dan etika politik, hak dan kewajiban warga negara, penegakan supremasi hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan. Nabi Muhammad Saw berhasil membangun masyarakat kota madinah yang terbuka, adil, egaliter dan demokratis. Piagam madinah yang menjamin hak sipil, keadilan sosial, supremasi hukum dan kepemimpinan yang bermoral mencerminkan bahwa piagam madinah telah merefleksikan adanya masyarakat sipil dalam masyarakat kota madinah (Iqbal, 1982).

Tilaar (1998) dalam membahas reformasi pendidikan mengemukakan perlu adanya reformasi pendidikan dalam rangka menciptakan masyarakat Indonesia yang bersatu dan demokratis atau masyarakat berdaya. Dalam masyarakat ini setiap anggota masyarakat mempunyai keberdayaan untuk mandiri, masyarakat berdaya itu adalah masyarakat madani yaitu masyarakat dimana anggotanya bebas dari ketakutan, bebas

berekspresi, bebas untuk menentukan arah kehidupannya dalam wadah persatuan dan kesatuan nasional. Di samping itu, terinspirasi dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa pakar, Effendi dalam Basyir, K, dkk, (2013: 287) mengemukakan bahwa *civil society* pada dasarnya adalah ‘tercipta adanya aktualisasi individu atau tatanan masyarakat yang mandiri, bebas dari intervensi negara, mempunyai posisi yang berimbang dengan penguasa atau Negara, mensyaratkan adanya ruang public dalam mengemukakan pendapat, adanya lembaga-lembaga yang mandiri dan dapat menyalurkan aspirasi serta memperjuangkan kepentingan-kepentingan publik’.

Dari pengertian masyarakat madani di atas terdapat beberapa pokok pikiran: (1) bahwa masyarakat madani adalah sebuah masyarakat modern, maju dan demokratis. (2) kemajuan tersebut adalah hasil dari kebebasan berfikir yang mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. (3) masyarakat modern yang maju didasarkan dan dijalani berdasarkan hukum yang menjamin kebebasan berfikir. (4) konsep masyarakat madani dapat berkonotasi masyarakat bangsa yang maju yang didukung oleh organisasi masyarakat sipil yang bebas. (5) dengan demikian masyarakat madani dapat dipakai sebagai masyarakat yang dicita-citakan (masyarakat maju yang modern yang beradab).

Menurut Dahlan (1998) masyarakat madani itu adalah sebagai masyarakat yang dicita-citakan, sebagai masyarakat yang ideal, dalam kajian filosofis mengacu pada masyarakat yang sempurna dan utama (kamil dan fadhil) dalam istilah alqur’an disebut Khairu ummah (Qs.3:110). Matondang (1998) menegaskan bahwa corak kepribadian masyarakat madani itu memiliki beberapa indikator yang dapat diamati dalam kehidupan nyata yang meliputi: (1) hubungan manusia dengan Tuhan yang meliputi iman dan taqwa taat dan tunduk, (2) hubungan antar sesama manusia yang meliputi kejujuran, amanah, persaudaraan, penegakan disiplin dan tanggung jawab, (3) hubungan dengan alam sekitar: mensyukuri nikmat Tuhan, meningkatkan etos kerja, melestarikan lingkungan dan memakmurkannya. Selanjutnya dalam Patricia (1981) menyatakan bahwa akhir abad dua puluh pendidikan kelihatan akan memperoleh titik cerah diseluruh bagian. Hak untuk mendapatkan pendidikan muncul dari ide demokratis, bahwa setiap orang harus punya kesempatan untuk menjadi pintar dan keluar dari penekanan khusus, bahwa setiap negara punya hak untuk bekerja.

E. Masyarakat Madani dan Kesejahteraan Sosial

Sebagai pijakan dalam pembahasan ini adalah mencari penyelesaian dan jawaban dari pertanyaan tentang ‘mungkinkah masyarakat madani mampu membangun kesejahteraan bagi tatanan kehidupan masyarakat’, dan apakah mungkin kesejahteraan dibangun dalam tatanan masyarakat yang tidak madani?. Dua permasalahan dan pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mendasar dalam menyikapi hubungan antara masyarakat madani dengan kesejahteraan. Karena bagaimanapun masyarakat madani dan kesejahteraan merupakan dua pilar yang berhubungan dan saling berkaitan dalam mewujudkan kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat.

Masyarakat madani atau *civil society* secara umum bisa iartikan sebagai suatu masyarakat atau institusi sosial yang memiliki ciri-ciri antara lain: kemandirian, toleransi, keswadayaan, kerelaan menolong satu sama lain, dan menjunjung tinggi norma dan etika yang disepakati secara bersama-sama (Syamsudin, 1998: 12). Dalam mendefinisikan terma masyarakat madani ini sangattergantungan pada kondisi sosio-kultural suatu bangsa, karenabagaimanapun konsep masyarakat madani merupakan bangunan terma yang lahir dari sejarah pergulatan bangsa Eropa Barat. Sebagai titik tolak, disini akan dikemukakan beberapa definisi masyarakat dari berbagai pakar di berbagai negara yang menganalisa dan mengkaji fenomena masyarakat madani ini.

Menurut Rahardjo (1996) masyarakat madani identik dengan cita-cita Islam membangun ummah. Masyarakat madani adalah suatu ruang (*realm*) partisipasi masyarakat melalui perkumpulan-perkumpulan sukarela (*voluntary association*) melalui organisai-organisasi massa. Masyarakat madani jika dipahami secara sepintas merupakan format kehidupan sosial yang mengedepankan semangat demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Dalam masyarakat madani, warga negara bekerjasama membangun ikatan sosial, jaringan produktif dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat non-governmental untuk mencapai kebaikan bersama. Karena itu, tekanan sentral masyarakat madani adalah terletak pada independensinya terhadap negara. Masyarakat madani berkeinginan membangun hubungan yang *konsultatif* bukan *konfrontatif* antara warga negara dan negara. Disinilah kemudian, masyarakat madani menjadi alternative pemecahan, dengan pemberdayaan dan penguatan daya kontrol masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang pada

akhirnya nanti terwujud kekuatan masyarakat sipil yang mampu merealisasikan dan mampu menegakkan konsep hidup yang demokratis dan menghargai hak-hak asasi manusia. Masyarakat madani dipercaya sebagai alternative paling tepat bagi demokratisasi, terutama di negara yang demokrasinya mengalami ganjalan akibat kuatnya hegemoni negara.

Menurut Raharjo (1999) ada tiga strategi yang salah satunya dapat digunakan sebagai strategi dalam memberdayakan masyarakat madani di Indonesia, antara lain: *Pertama*, strategi yang lebih mementingkan integrasi nasional dan politik. Strategi ini berpandangan bahwa sistem demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat. Bagi penganut paham ini pelaksanaan demokrasi liberal hanya akan menimbulkan konflik, dan karena itu menjadi sumber instabilitas politik. Saat ini yang diperlukan adalah stabilitas politik sebagai landasan pembangunan, karena pembangunan—lebih terbuka terhadap perekonomian global – membutuhkan resiko politik yang minim. Dengan demikian persatuan dan kesatuan bangsa lebih diutamakan dari pada demokrasi.

Kedua, strategi yang lebih mengutamakan reformasi sistem politik demokrasi. Strategi ini berpandangan bahwa untuk membangun demokrasi tidak usah menunggu rampungnya tahap pembangunan ekonomi. Sejak awal dan secara bersama-sama diperlukan proses demokratisasi yang pada essensinya adalah memperkuat partisipasi politik. Jika kerangka kelembagaan ini diciptakan, maka akan dengan sendirinya timbul masyarakat madani yang mampu mengontrol negara.

Ketiga, strategi yang memilih membangun masyarakat madani sebagai basis yang kuat kearah demokratisasi. Strategi ini muncul akibat kekecewaan terhadap realisasi dari strategi pertama dan kedua. Dengan begitu strategi ini lebih mengutamakan pendidikan dan penyadaran politik, terutama pada golongan menengah yang semakin luas.

Ketiga model strategi pemberdayaan masyarakat madani tersebut di atas dipertegas oleh Hikam bahwa di era transisi ini harus dipikirkan prioritas-prioritas pemberdayaan dengan cara memahami target-target *group* yang paling strategis serta penciptaan pendekatan-pendekatan yang tepat di dalam proses tersebut. Untuk keperluan itu, maka keterlibatan kaum cendikia, LSM, ormas dan keagamaan dan

mahasiswa, mutlak adanya. Menurut Hikam (1999) strategi pemberdayaan masyarakat madani di Indonesia, dilakukan dengan: *Pertama*, pemetaan atau identifikasi permasalahan dasar menyangkut perkembangan masyarakat madani, khususnya kelompok-kelompok strategis di dalamnya harus mendapat prioritas. Pada tahap inidiupayakan penelitian atau pengkajian yang mendalam baik secara umum maupun khusus terhadap potensi-potensi yang ada dalam masyarakat untuk menumbuhkembangkan masyarakat madani.

Kedua, menggerakkan potensi-poensi yang telah ditemukan tersebut sesuaidengan bidang-bidang atau garapan masing-masing. Misalnyabagaimana menggerakkan komunitas pesantren di wilayah-wilayahpedesaan agar mereka ikut memperkuat basis ekonomi dan sosial lapisan bawah. Dalam tahapan ini, jelas harus terjadi reorientasi dalammodel pembangunan sehingga proses penggerakan sumber daya dilapisan bawah tidak lagi berupa eksploitasi karena pola *top-down*.Justeru dalam tahapan ini sekaligus diusahakan untuk menghidupkandan mengaktifkan keswadayaan masyarakat yang selama initerbungkam.Pendekatan yang digunakan adalah pendekatanparsipatoris karena. Pada tingkat kelas menengah, tahapan keduaini diarahkan kepada penumbuhan kembali jika *entrepreneur* yangsejati sehingga akan muncul sebuah kelas menengah yang mandiridan tangguh. Potensi demikian sudah cukup besar dengan semakin bertambah banyaknya generasi muda yang berpendidikan tinggi dan berpengalaman dalam bisnis yang berlingkup global. Para profesional muda ini, menurut pengamatan akan menjadi tulang punggung utamakelas menengah baru yang memiliki kepedulian besar terhadapkemandirian, pemberdayan, dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terbukti antara lain dengan munculnya kelompok solidaritas profesional muda yang mendukung gerakan reformasi. Mereka menuntut transparansi dan kemandirian dalam dunia bisnis di samping menunjukkan kepedulian terhadap nasib rakyat jelata di lapisan bawah.

F. Kesimpulan

Learning society merupakan fondasi lahirnyacivil society. Jika masyarakat belajar terwujud, pada akhirnya akan melahirkan masyarakat yang berperadaban, berdaya, demokratis, menghormati nilai-nilai moral, menjamin hakmilik dan kebebasan,

masyarakat yang suka kepada perubahan, *take and give information*, saling interaksi, sehingga tidak ada lagi saling mencurigai, saling bermusuhan, mengambil keuntungan sendiri. Hal ini sejalan dengan masyarakat madani yang dicita-citakan yaitu masyarakat yang sempurna dan utama (*kamil dan fadhil*).

Dalam masyarakat belajar tidak ada lagi pembatasan pendidikan formal, informal dan non formal, karena semua masyarakat, siapa dan dimana saja, kapan saja selalu berada dalam belajar (*continuing education*). Masyarakat belajar dimana setiap anggotanya mau belajar dan mau membelajarkan. Islam sangat menghargai orang yang mau belajar sampai Allah Swt bersumpah “Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan rugi, kecuali orang yang beriman, mau bekerja keras, saling belajar dan saling membelajarkan.

Mewujudkan masyarakat madani merupakan suatu upaya mengangkat harkat dan martabat manusia pada posisi yang sebenarnya untuk menghadapi berbagai tantangan terutama dalam memberdayakan potensi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta semakin tumbuhnya kesadaran akan arti pentingnya strategi pemberdayaan yang tepat bagi perluasan kekuatan masyarakat madani.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Jawi, Muhammad Shiddiq. *Deanakronisasi Civil Society: Kritik Islam atas Konsep Masyarakat Madani*. Al-Wa'ie, No. 19 Tahun II, Maret 2002.
- Azra, Azyumardi, 2000. *Menuju Masyarakat Madani (Gagasan, fakta, dan Tantangan)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Basir, K. dkk, 2013. *Pancasila dan Kewarganegaraan*. Surabaya: Sunan Ampel Press.
- Hikam, Muhammad, AS., 1999. *Islam, Demokratisasi, dan Pemberdayaan Civil Society*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Husen, Toesten, 1995. *Masyarakat Belajar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jainuri, Ahmad., 2000. *Agama dan Masyarakat Madani: Rujukan Khusus Tentang Sikap Budaya, Agama dan Politik*. Jurnal Al-Afkar, Edisi III, Tahun ke 2: Juli-Desember 2000.
- Kamil, Mustafa, tt. *Pendidikan Non Formal dalam Membangun Masyarakat Gemar Belajar (Learning Society) (Analisis Masyarakat Sebagai Sasaran)*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).
- Kuntoro, Sodik A., 1997. *Pengembangan Masyarakat Belajar dalam Kerangka Pembangunan*. *Cakrawala Pendidikan*, No.1, Tahun XVI, Februari 1997.

- Sujana, Djuju, 2000. *Strategi Pembelajaran dalam Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung: Nusantara Press.
- Syamsuddin, Din, 1999, *Etika Agama dalam membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Trianto, 2010. *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahardjo, M. Dawam, 1996. *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*, Jakarta: LP3ES, 1999.cet. ke.1.
-1996. *Agama dan Masyarakat Madani*, dalam Seri Dialog Kebudayaan.
- Rosyada, Dede, 2003. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education); Demokrasi, Hak asasi Manusia, & Masyarakat Madani*. Jakarta: Tim ICCE UIN Jakarta dan The Asia Foundation.